

## ORKESTRASI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG

Aulia Aghyantje Tajudin  
Universitas Padjadjaran  
[aulia19028@mail.unpad.ac.id](mailto:aulia19028@mail.unpad.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting disusun dan dijalankan, serta mengapa strategi tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting secara konsisten dalam kurun waktu tertentu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta teori strategi publik Geoff Mulgan sebagai kerangka analisis, khususnya dua dimensi utama: sumber daya publik dan kewenangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan pelaksanaan program. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode. Temuan menunjukkan bahwa strategi yang dirancang belum terinstitusionalisasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, distribusi dan kapasitas SDM belum proporsional, serta sistem informasi masih bersifat sektoral. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum efektif karena lemahnya fungsi orkestrasi dan keterbatasan daya paksa regulatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendekatan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung cenderung bersifat administratif dan belum begitu responsif terhadap kompleksitas persoalan di lapangan. Studi ini merekomendasikan penguatan instrumen regulasi yang operasional, integrasi kelembagaan yang fungsional, serta peningkatan kapasitas implementasi program lintas sektor secara terukur dan adaptif.

Kata Kunci: **Stunting, Strategi Publik, Sumber Daya, Kewenangan, Pemerintah Daerah**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how the Bandung Regency Government formulates and implements its stunting reduction strategy and why this strategy has yet to produce significant and consistent impacts on reducing stunting prevalence. Using a qualitative case study approach and Geoff Mulgan's theory of public strategy as the analytical framework, the research focuses on two critical dimensions: resources and power. Data were collected through in-depth interviews with key informants across various local government agencies, field observations, and document analysis of relevant policies and program reports. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, with source and method triangulation employed for validation. The findings reveal that the strategy has not been institutionalized within budgeting and planning systems; human resource distribution and capacity remain inadequate; and data systems are fragmented and sectoral. Furthermore, intersectoral coordination lacks effectiveness due to*

*limited orchestration and weak regulatory enforcement. The study indicates that Bandung's strategic approach remains largely administrative and is not yet responsive to the complexities of field conditions. It recommends the development of more operational regulatory instruments, functional institutional integration, and the strengthening of cross-sector implementation capacity in a measurable and adaptive manner.*

**Keywords:** *Stunting, Public Strategy, Resources, Power, Local Government*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan total mencapai 275,36 juta jiwa, tengah menyongsong satu abad kemerdekaannya pada 2045 yang digagas sebagai tonggak terwujudnya Generasi Emas Indonesia (Purwanti et al., 2022). Konsep ini mengandung harapan lahirnya generasi unggul, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta berkarakter kuat (Lemhanas, 2021). Untuk mencapainya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama, yang salah satunya ditentukan oleh kesehatan dan gizi anak sejak dini. Namun, Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa tingginya angka stunting, yaitu gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting didefinisikan sebagai balita dengan nilai z-score  $< -2$  SD berdasarkan kurva WHO (Wapresri.go.id, 2022). Dampak stunting meluas pada pertumbuhan fisik, kualitas kognitif, produktivitas, dan kerentanan terhadap penyakit. Kondisi ini relevan bagi Kabupaten Bandung, salah satu wilayah dengan prevalensi stunting 31,10%, tertinggi keempat di Jawa Barat (Wapresri.go.id, 2022).

Perkembangan stunting di Kabupaten Bandung mencerminkan tantangan implementasi kebijakan gizi lokal. Data menunjukkan prevalensi menurun dari 40,7% pada 2013 menjadi 27,87% pada 2019, namun kembali naik menjadi 31,1% pada 2021, jauh di atas rata-rata Jawa Barat (24,5%) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2022). Kenaikan ini terjadi meski program intervensi telah dilaksanakan. Fakta ini menunjukkan capaian sebelumnya belum kokoh dan mengindikasikan lemahnya perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor, serta kapasitas pelaksana. Sebagaimana ditunjukkan oleh Srifridayanti et al., (2025) pengalaman Kota Palu memperlihatkan bahwa meski ada intervensi edukasi dan pendampingan kesehatan, stunting tetap sulit ditekan bila kolaborasi lintas aktor tidak berjalan konsisten.

Fenomena fluktuatif ini merupakan akumulasi faktor struktural dan kelembagaan. Kajian menunjukkan stunting tidak cukup ditangani dengan pendekatan sektoral, tetapi menuntut strategi lintas sektor berbasis lokal. Sunaryo et al., (2021) melalui kerangka Van Meter dan Van Horn menegaskan keberhasilan implementasi dipengaruhi standar, sumber daya, komunikasi, dan karakteristik pelaksana. Salmon et al., (2022) menambahkan pentingnya kepemimpinan dan keberlanjutan program. Purwanti et al., (2022) menekankan penguatan komunitas dan kelembagaan desa. Agustin & AR, (2024)

menegaskan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia, khususnya kader posyandu dan bidan desa, merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi melalui edukasi langsung kepada Masyarakat.

Sejalan dengan itu, Srifridayanti et al., (2025) memperlihatkan bahwa pencegahan melalui edukasi gizi dan pendampingan petugas kesehatan harus berjalan beriringan dengan penanggulangan seperti pemberian makanan tambahan agar hasilnya signifikan. Kajian lain oleh Sulaeman et al., (2022) menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* memperburuk kondisi gizi anak karena dampak pada ketenagakerjaan: meningkatnya pengangguran, penurunan produktivitas, dan gangguan kesehatan mental keluarga pekerja, yang pada akhirnya mengurangi kualitas perawatan dan asupan gizi anak.

Meski demikian, mayoritas studi cenderung menekankan implementasi teknis dan kelembagaan secara parsial. Belum banyak yang mengkaji strategi pemerintah daerah sebagai artikulasi kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya publik secara integratif. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting, tidak sekadar sebagai proses administratif, tetapi sebagai arena di mana kekuasaan publik dikonversi menjadi kebijakan nyata.

Dalam praktiknya, penanganan stunting di Kabupaten Bandung belum konsisten menunjukkan hasil positif. Penetapan 48 desa sebagai lokus prioritas melalui Keputusan Bupati 440/Kep/148-Dinkes/2021 dan dimasukkannya agenda penurunan stunting ke dalam RPJMD 2021–2026 belum mampu menekan angka prevalensi. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara intensi kebijakan dan hasil empiris. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting 2021 mengidentifikasi empat masalah utama: (1) stunting belum menjadi prioritas dalam RKA/DPA perangkat daerah; (2) belum adanya basis data stunting hingga level desa; (3) terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pengukur gizi serta tenaga kesehatan desa; dan (4) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu stunting. Temuan ini memperlihatkan adanya disjuncture antara regulasi normatif dengan kapasitas operasional di lapangan.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 sejatinya telah mengatur intervensi gizi secara komprehensif, baik spesifik (ibu hamil, balita) maupun sensitif (infrastruktur dasar, edukasi, pemberdayaan keluarga). Struktur kelembagaan juga dibentuk melalui SK Bupati 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satgas Stunting yang melibatkan OPD lintas sektor. Namun, hasil observasi dan dokumen menunjukkan sinergi antarlembaga berjalan parsial. Kelemahan dalam konsolidasi peran, pemanfaatan data, anggaran, dan tenaga pelaksana menghambat efektivitas program. Situasi ini mengindikasikan strategi pemerintah daerah masih bergerak administratif dan sektoral, belum sebagai mekanisme pengambilan keputusan terkoordinasi. Padahal, strategi publik

seharusnya memobilisasi kekuasaan dan sumber daya secara sistematis untuk tujuan bersama (Mulgan & Geoff, 2009).

Kondisi Kabupaten Bandung dengan kompleksitas wilayah dan populasi besar menjadikan kebutuhan akan strategi terintegrasi semakin mendesak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pertanyaan utama: bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting pada 2021, dan mengapa strategi tersebut belum mampu menurunkan prevalensi secara konsisten? Fokus ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memahami strategi pemerintah daerah, tidak hanya sebagai serangkaian program teknis, melainkan sebagai ekspresi tata kelola kekuasaan publik dan pengelolaan sumber daya dalam pembangunan manusia berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi strategi penanganan stunting di Kabupaten Bandung. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat kontekstual, prosedural, dan melibatkan interaksi kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan melalui pengukuran kuantitatif semata (Creswell, 2016). Data penelitian bersumber dari data primer berupa wawancara mendalam dengan aktor kunci yang terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta data sekunder berupa dokumen perencanaan, regulasi teknis, dan laporan kinerja perangkat daerah. Kerangka analisis menggunakan teori strategi publik Mulgan & Geoff, (2009) untuk membaca bagaimana dimensi sumber daya dan kewenangan bekerja dalam praktik kebijakan lokal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris pada dimensi *resources* dan *power*. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi, serta melakukan konfirmasi terbatas kepada informan kunci (Creswell, 2016). Metodologis ini dipilih karena masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis program, tetapi juga lemahnya koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan fragmentasi kebijakan, sehingga membutuhkan pendekatan analisis yang mampu menangkap dinamika implementasi secara komprehensif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Stunting melalui Dimensi Sumber Daya & *Power*: Menelisik Bagaimana Strategi Dilaksanakan dan Mengapa Belum Optimal?**

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting beroperasi dalam ekosistem pemerintahan yang kompleks, melibatkan aktor lintas sektor, instrumen kelembagaan, dan dukungan sumber daya terbatas. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana strategi dilaksanakan serta mengapa belum mampu menurunkan angka stunting secara konsisten, penelitian ini menggunakan teori strategi publik (Mulgan & Geoff, (2009), melalui dua dimensi utama: sumber daya dan *power* (kewenangan).

Dimensi sumber daya mencakup perencanaan, anggaran, kapasitas SDM, data, dan sistem informasi, sedangkan dimensi power menitikberatkan pada legitimasi regulatif, koordinasi antar-perangkat daerah, dan kepemimpinan. Kedua dimensi ini dipadukan untuk menjelaskan pelaksanaan teknis strategi sekaligus faktor penghambat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

### **Menelisik Sumber Daya melalui Anggaran, SDM, Data, dan Instrumen Kelembagaan dalam Strategi Penanganan Stunting**

Dimensi sumber daya dalam strategi public Mulgan & Geoff, (2009) menekankan pemanfaatan aset negara, bukan hanya anggaran, tetapi juga kapasitas SDM, akurasi data, serta sarana kelembagaan yang menopang implementasi (Wapresri.go.id, 2022). Dalam konteks stunting, sumber daya menentukan apakah strategi berjalan nyata atau hanya berhenti pada tataran deklaratif (Sunaryo et al., 2021).

Penelitian ini menelusuri bagaimana strategi penanganan stunting di Kabupaten Bandung dijalankan melalui empat indikator: alokasi anggaran, kompetensi SDM, ketersediaan data, serta dukungan kelembagaan (Mulgan & Geoff, 2009). Analisis dilakukan dengan triangulasi wawancara, observasi, dan dokumen resmi untuk memahami dinamika pelaksanaan dan hambatan aktual.

Pada indikator pertama, yaitu alokasi anggaran dan perencanaan, peneliti melakukan wawancara kepada seorang pejabat Bappelitbangda yang menyampaikan:

*“....Secara umum, urusan stunting belum menjadi prioritas perencanaan utama di banyak perangkat daerah, meskipun telah ada instruksi nasional. Hal ini mempengaruhi konsistensi penganggarnya.”*

Wawancara menunjukkan strategi Pemerintah Kabupaten Bandung belum terorkestrasi baik, karena integrasi prioritas dalam dokumen perencanaan lintas sektor lemah sehingga alokasi anggaran tidak sebanding dengan urgensi isu.

Namun, observasi dan telaah dokumen realisasi anggaran menemukan semua OPD tetap mencantumkan stunting dalam RKA (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021). Meski demikian, isu ini di Musrenbang kecamatan lebih sering muncul sebagai bagian dari isu kesehatan umum, bukan agenda lintas sektor strategis (Sunaryo et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prioritas normatif nasional dan praktik operasional daerah (Kementerian Kesehatan, 2022; Wapresri.go.id, 2022).

**Tabel 2.** Anggaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting OPD di Kabupaten Bandung Tahun 2021

| No | Perangkat Daerah | Alokasi Anggaran  |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan  | Rp 15.268.877.738 |
| 2  | DP2KBP3A         | Rp 475.965.015    |

**Sumber:** Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2021

Tabel 2. Menunjukkan studi dokumen dari laporan percepatan penurunan stunting tahun 2021, bahwa setiap OPD berupaya meralisasikan anggarannya untuk penurunan percepatan stunting yang kemudian direalisasikan. Meskipun hanya terdapat 2 OPD yang menjadi representasi Kabupaten Bandung.

**Tabel 3.** Program & Kegiatan Beberapa OPD untuk Mendukung Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

| Program                                                                     | Kegiatan                                                                                                                                                                     | Perangkat                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten                                                                                              | Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                             | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung  |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                             | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                      | Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung  |

**Sumber:** Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2021

Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan informan, hasil observasi, dan studi dokumen yang menunjukkan strategi penanganan stunting di Kabupaten Bandung sudah memiliki legitimasi perencanaan dan pembiayaan (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021). Namun, strategi ini belum terinstitusionalisasi secara struktural dalam perencanaan fiskal daerah sehingga menghambat efektivitas program.

Pada indikator kedua, penelitian menyoroti kompetensi SDM sebagai aktor teknis yang menjembatani kebijakan dan implementasi (Mulgan & Geoff, 2009; Sunaryo et al., 2021). Kapasitas yang rendah atau jumlah SDM yang tidak memadai dapat melemahkan eksekusi kebijakan, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengungkapkan kondisi sebagai berikut:

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung, menurutnya;

*“...SDM yang kita miliki terbatas, karena faktor usia, aspek anggaran yang dimiliki untuk operasional yang ikut juga berpengaruh”*

Pernyataan ini diperkuat juga dengan pernyataan dari Subkoor Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dr.Iis menurutnya:

*“...dari segi koordinasi yang belum maksimal antar dinas termasuk dalam penanganan balita berisiko stunting karena belum semua pihak memahami betul bagaimana pencegahan stunting, kemudian dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang banyak sementara jumlah Sdm dan anggaran kami yang terbatas menjadi hambatan dalam pencegahan stunting ini.”*

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM menjadi hambatan nyata dalam menjangkau seluruh desa, di mana pemantauan gizi sering terbebani oleh personel yang minim, khususnya di wilayah dengan kasus tinggi (Kementerian Kesehatan, 2022; Wapresri.go.id, 2022).

Observasi menunjukkan kegiatan penimbangan masih bergantung pada kader posyandu sukarela, dengan dukungan terbatas dari tenaga Kesehatan (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021). Bahkan, pemahaman kader terhadap standar WHO masih rendah (World Health Organization, 2009).

Temuan ini menegaskan masalah SDM bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas teknis (Sunaryo et al., 2021). Tanpa penguatan sistemik melalui pelatihan, distribusi, dan insentif (Christensen & Læg Reid, 2013). Sebagai konsekuensinya, efektivitas intervensi lapangan tetap terbatas (McKay et al., 2015b).

Pada indikator ketiga, integrasi sistem informasi muncul sebagai aspek krusial dalam mengukur efektivitas strategi. Wawancara dengan salah satu informan kunci dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan keselarasan data antarinstansi serta masyarakat. Informan menyampaikan:

*“Faktor luas wilayah karena kita itu kan ada 31 kelurahan, 220 desa dan 10 kecamatan dengan SDM yang kita miliki terbatas, lalu faktor usia, aspek anggaran yang dimiliki untuk operasional.”*

Ibu dr. Iis selaku Subkoor Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyatakan:

*“...Hambatan dari segi koordinasi yang belum maksimal antar dinas termasuk dalam penanganan balita berisiko stunting karena belum semua pihak memahami betul bagaimana pencegahan stunting, kemudian dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang banyak sementara jumlah Sdm dan anggaran kami yang terbatas menjadi hambatan dalam pencegahan stunting ini”*

Pernyataan ini mengindikasikan adanya fragmentasi informasi antarlembaga teknis menyebabkan basis data tunggal intervensi sulit terwujud, memperlambat perencanaan dan berisiko salah sasaran (Christensen & Læg Reid, 2013; McKay et al., 2015b).

Observasi menunjukkan OPD menggunakan data berbeda—SSGI, e-PPGBM, dan laporan manual desa (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021). sementara pemahaman terhadap klasifikasi WHO masih terbatas (Wapresri.go.id, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, temuan dalam indikator ini adalah strategi pemerintah dalam hal pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi secara lintas sektor. Akibatnya, strategi data pemerintah belum terintegrasi lintas sektor (Mulgan & Geoff, 2009). sehingga evidence-based policy menjadi lemah (Bhutta, et al., 2013).

Dalam strategi publik, sarana dan instrumen kelembagaan merupakan bagian vital dari sumber daya Mulgan & Geoff, (2009) Dukungan fasilitas, mekanisme koordinasi, dan perangkat regulatif dibutuhkan agar strategi berjalan berkelanjutan (Christensen & Læg Reid, 2013). Salah satu inovasi kelembagaan di Kabupaten Bandung adalah program Gekssor (Gerakan Konsumsi Sayur, Susu, dan Telur) yang diluncurkan Diskominfo sebagai intervensi gizi sensitif. Informan menyampaikan:

*“Program Gekssor hanya menysasar beberapa desa seperti di Cicalengka, itu pun skalanya masih uji coba. Belum semua sektor mengintegrasikan programnya ke dalam penanganan stunting.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif program di tingkat OPD, cakupan pelaksanaannya masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari skema intervensi lintas sektor yang terkoordinasi secara kelembagaan (McKay et al., 2015b). Inisiatif masih bersifat sektoral, dengan keterlibatan OPD yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi bersama (Bixby, 2014).

Hasil observasi peneliti mendukung temuan tersebut. Dalam kunjungan lapangan ke salah satu desa lokus, program Gekssor memang tampak dijalankan dalam bentuk kegiatan pembagian telur dan susu bagi ibu hamil, namun tanpa keterlibatan langsung dari OPD lain seperti DP2KBP3A atau Dinas Kesehatan. Selain itu, tidak ditemukan materi edukasi gizi terintegrasi atau modul pendamping yang bersifat lintas sektor, sehingga efektivitas program berisiko rendah jika tidak diiringi pendekatan komprehensif (Bhutta, et al., 2013).

Dengan mempertimbangkan ketiga sumber data tersebut, wawancara, observasi, dan dokumen, dapat terlihat bahwa temuan dalam hal dukungan sarana dan instrumen kelembagaan masih berada pada tahap inisiasi yang terbatas dan belum terstruktur secara sistematis (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021). Minimnya integrasi kelembagaan dan terbatasnya cakupan program inovatif seperti Gekssor menandakan bahwa sumber daya kelembagaan belum dioptimalisasi sebagai platform strategis dalam orkestrasi kebijakan lintas sektor yang berkelanjutan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2020).

Untuk memperjelas bagaimana keempat indikator dalam dimensi sumber daya tersebut tercermin dalam program-program konkret pemerintah daerah, tabel berikut merangkum hasil analisis terhadap dua program utama yang berkaitan langsung dengan strategi penanganan stunting di Kabupaten Bandung:

**Tabel 4.** Analisis Strategi Penanganan Stunting Berdasarkan Dimensi Sumber Daya

| Nama Program                                                | Sumber Daya Publik                                                                                                                                                                                                                                  | Temuan dan Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM: Dinas Kesehatan, Bidan Desa, Kader PKK, Masyarakat rentan</li> <li>Keuangan: Rp204 Miliar (Realisasi 64%)</li> <li>Sarana &amp; Prasarana: Posyandu, Puskesmas, Alat Kesehatan, SI Kesehatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi belum terinstitusionalisasi; anggaran belum jadi prioritas OPD.</li> <li>Realisasi anggaran rendah; pelaksanaan tidak sinkron.</li> <li>SDM kesehatan belum memadai secara distribusi dan kompetensi.</li> <li>Sistem informasi belum terintegrasi; kebijakan tidak <i>evidence-based</i>.</li> </ul> |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera     | <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM: DP2KBP3A, Kader Ketahanan Keluarga</li> <li>Keuangan: Rp19,8 Miliar (Realisasi 98%)</li> <li>Sarana &amp; Prasarana: Sarana BKB, BKR, PIK-R, Operasional Kader</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program bersifat preventif dan informatif, belum transformatif.</li> <li>Metode sosialisasi monoton dan minim inovasi.</li> <li>Kader terbatas dalam jumlah dan kapasitas.</li> <li>Strategi belum menyentuh penguatan kelembagaan berbasis masyarakat secara mendalam.</li> </ul>                             |

Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2021

Tabel 4 memperlihatkan bahwa persoalan sumber daya tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menunjukkan belum matangnya fondasi kelembagaan dalam mendukung strategi stunting.

Empat tantangan utama ditemukan: (1) alokasi anggaran belum terintegrasi konsisten dalam sistem fiskal daerah. (2) kompetensi dan jumlah SDM masih terbatas. (3) data dan sistem informasi belum lintas sektor sehingga lemah dalam *evidence-based policy*. (4) sarana kelembagaan masih tahap inisiasi. Secara keseluruhan, strategi sumber daya masih parsial dan belum terinternalisasi dalam tata kelola terstruktur. Keempat temuan ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa strategi dalam dimensi sumber daya masih bersifat parsial dan belum terinternalisasi dalam sistem tata kelola yang terstruktur.

Dalam menjawab tantangan dari tiap temuan tersebut, analisis lebih lanjut dapat merujuk pada konsep "*strategic capacity*" dalam tata kelola publik, sebagaimana dikemukakan oleh (Christensen & Lægreid, 2013). Konsep ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusi dalam tiga ranah: *capacity to steer*, *capacity to coordinate*, & *capacity to learn*. Pada kasus Kabupaten Bandung, kapasitas untuk mengarahkan (*steer*) belum optimal karena ketiadaan prioritas fiskal yang jelas; kapasitas untuk berkoordinasi terbatas karena lemahnya instrumen kelembagaan; dan kapasitas untuk belajar (melalui data dan *feedback*) lemah akibat tidak tersedianya sistem informasi yang integratif.

Untuk mengatasi hal ini, literatur studi kebijakan lokal di negara berkembang, seperti yang dilakukan oleh McKay et al., (2015a) dalam studi penanganan gizi buruk di Tanzania, menekankan pentingnya *embedded resource integration*, yaitu integrasi sumber daya dalam skema yang berbasis komunitas dan data mikro spasial. Dalam studi tersebut, kebijakan yang menempatkan sistem informasi sebagai pusat pengambilan keputusan lintas sektor terbukti mampu mengurangi mismatch antara program pusat dan kebutuhan lapangan.

Lebih lanjut, penguatan SDM dalam penanganan stunting seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pelatihan teknis periodik, tetapi juga melalui pendekatan *capability building* yang terdesentralisasi. Seperti yang ditunjukkan oleh studi Bhutta, et al., (2013) dalam konteks Asia Selatan, keberhasilan program intervensi gizi sangat ditentukan oleh keberadaan kader lokal dengan pelatihan yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat.

Pada sisi anggaran dan perencanaan, konsep *performance-based budgeting* yang telah diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia terbukti mampu mendorong OPD menjadikan isu stunting sebagai prioritas program. Studi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa integrasi indikator output stunting dalam mekanisme kinerja OPD meningkatkan komitmen dan alokasi anggaran yang lebih konsisten (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2020).

Akhirnya, dukungan sarana dan kelembagaan perlu ditransformasikan dari sekadar wadah administratif menjadi platform kolaboratif. Di sini, pendekatan *collective impact* seperti yang dikembangkan oleh Bixby, (2014) menjadi relevan. Pendekatan ini menyarankan pembentukan struktur koordinasi lintas sektor dengan peran pusat data bersama (*shared measurement system*) dan pemimpin inisiatif (*backbone support organization*), yang dapat dijadikan model dalam memperkuat TPPS dan inovasi lokal seperti Gekssor agar tidak hanya bersifat simbolik (Bappelitbangda Kabupaten Bandung, 2021).

### **Menelaah Dimensi Power melalui Regulasi, dan Koordinasi**

Sementara dimensi sumber daya menyoroti fondasi operasional strategi, dimensi power dalam teori strategi publik Mulgan & Geoff, (2009) merujuk pada kapasitas negara untuk memobilisasi dan mengarahkan aset tersebut secara strategis. Power tidak hanya berupa kekuasaan formal, tetapi juga mencakup legitimasi regulatif, efektivitas koordinasi antarlembaga, dan kekuatan kepemimpinan dalam menyatukan aktor lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penanganan stunting di tingkat daerah, power menjadi kunci untuk memastikan bahwa berbagai komponen sistem pemerintahan bekerja dalam satu orkestrasi kebijakan yang terintegrasi (Shimaoka & Sato, 2014).

Melalui dimensi ini, penelitian menelaah bagaimana kekuasaan strategis pemerintah daerah dijalankan, baik dalam kerangka regulatif maupun dalam praktik koordinasi dan kepemimpinan. Fokus analisis diarahkan pada tiga indikator utama: (1) kekuatan regulatif dan legitimasi kewenangan, (2) koordinasi lintas sektor dan struktur kelembagaan. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana strategi dilaksanakan, tetapi juga mengidentifikasi mengapa kekuatan birokratik dan politik yang tersedia belum cukup efektif dalam menurunkan angka stunting secara konsisten (Christensen & Lægreid, 2013).

Dalam teori strategi publik, kekuatan regulatif dan legitimasi kewenangan menjadi fondasi dari kapasitas pemerintah untuk mengarahkan tindakan kolektif. Menurut Mulgan & Geoff, (2009) otoritas formal yang dilekatkan melalui peraturan perundang-undangan menentukan apakah strategi dapat dijalankan secara sah, diakui, dan ditaati oleh aktor-aktor pelaksana. Dalam konteks kebijakan penanganan stunting, peran regulasi sangat krusial untuk menetapkan locus tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta otoritas pengambilan keputusan lintas sektor (Christensen & Lægreid, 2013). Menurut perwakilan Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung dalam sesi wawancara:

*“Dalam PERBUP bahwa vocal point-nya memang di Dinkes, BAPPEDA dan BKKBN. Dan apabila melihat dari regulasi tingkat pusat itu PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 bahwa memang ada good willing dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kecamatan. Dalam PERPRES diamanatkan harus membentuk kelembagaan, kelembagaan adalah tim percepatan penurunan stunting atau TPPS, nah di Kabupaten Bandung sebagai komitmen sudah terbentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.”*

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dari sisi formalitas, Pemerintah Kabupaten Bandung telah memenuhi syarat regulatif, termasuk pembentukan TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) sebagai struktur kelembagaan resmi. Namun, saat peneliti melakukan observasi terhadap beberapa dokumen dan agenda kegiatan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, ditemukan bahwa keberadaan TPPS belum sepenuhnya aktif dalam koordinasi maupun dalam penyusunan perencanaan program. Hal ini terlihat dari minimnya dokumentasi agenda rapat koordinasi, absennya pelaporan kegiatan berkala, serta tidak sinkronnya data TPPS dengan program OPD terkait.

Sebagai contoh, hasil observasi menunjukkan bahwa pada dokumen Berita Acara Rapat TPPS Kecamatan yang berhasil diperoleh dari dua kecamatan, kegiatan hanya berlangsung sekali dalam satu tahun, tanpa tindak lanjut lintas sektor yang jelas. Selain itu, struktur keanggotaan TPPS di tingkat desa masih belum sepenuhnya mengacu pada

pedoman yang tercantum dalam regulasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja TPPS versi Kemendagri (Kemendagri, 2020).

Temuan observasi ini sejalan dengan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa beban penanganan stunting tidak sepenuhnya bisa dipikul oleh Dinkes sebagai leading sector. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Iis, Subkoordinator Kesehatan Masyarakat:

*“Penanganan stunting itu porsi Dinkes ya sekitar 30% saja, selebihnya harus didukung dinas lain. Karena kan ini masalahnya multidimensi, bukan hanya soal gizi tapi juga lingkungan, pendidikan, bahkan ekonomi.”*

Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun secara regulatif strategi penanganan stunting telah memiliki legitimasi formal, dalam praktiknya belum diikuti dengan kekuatan pengaturan yang bersifat mengikat dan mengarahkan perilaku institusional secara menyeluruh. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa legal *framework* yang tersedia belum cukup kuat untuk menciptakan sistem yang berjalan secara mandatori, sehingga implementasi di *level* bawah masih bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan (Andrews et al., 2013).

Indikator kedua mengenai koordinasi lintas sektor dan penguatan struktur kelembagaan menjadi esensi dari praktik kekuasaan yang efektif. Mulgan & Geoff, (2009) menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari legalitas formal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah untuk menyatukan berbagai aktor, merumuskan agenda bersama, dan menciptakan struktur kolaborasi yang fungsional. Dalam penanganan stunting yang bersifat multidimensional, keberhasilan sangat bergantung pada sinergi antar-OPD, lembaga desa, dan sektor pendukung lainnya dalam satu arsitektur kelembagaan yang terkoordinasi (Shimaoka & Sato, 2014).

Wawancara dengan informan dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa meskipun telah dibentuk Satuan Tugas Penurunan Stunting, mekanisme koordinasi di lapangan belum berjalan optimal:

*“Koordinasi antar OPD itu kadang jalan sendiri-sendiri. Padahal di SK-nya kita sudah ditentukan peran dan tanggung jawabnya, tapi kenyataannya belum semuanya terlibat aktif.”*

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kelembagaan formal tidak selalu menciptakan praktik koordinasi yang sinergis. Beberapa OPD cenderung menjalankan programnya secara sektoral tanpa integrasi dengan rencana strategis bersama (Christensen & Lægveid, 2013). Hal ini memperlemah potensi strategi sebagai upaya kolektif lintas sektor.

Hasil observasi peneliti pada pertemuan koordinasi tingkat kabupaten dan pelaksanaan program di desa menunjukkan bahwa koordinasi lebih bersifat administratif, bukan substantif. Forum lintas OPD cenderung bersifat seremonial, dengan minimnya tindak lanjut teknis (McKay et al., 2015a). Selain itu, di tingkat desa, kepala desa dan kader posyandu sering kali menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui secara langsung keterlibatan OPD lain di wilayahnya dalam intervensi stunting (Bhutta, et al., 2013).

Dukungan dokumen dapat dilihat dari struktur kelembagaan dalam SK Bupati No. 441.1/Kep.144-Dinkes/2019, yang menyusun Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan Dinas Kesehatan sebagai ketua harian, DP2KBP3A, Dinas

Pertanian, dan OPD lainnya. Namun dokumen tersebut tidak menjelaskan secara operasional mekanisme koordinasi lintas OPD, indikator evaluasi, atau forum permanen sebagai pengikat peran. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi sektoral dalam implementasi, sehingga sinergi yang diharapkan tidak terjadi secara utuh (Bixby, 2014).

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumen tersebut, didapati temuan bahwa kekuatan koordinatif Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting masih belum terbangun secara sistemik. Struktur kelembagaan memang terbentuk secara administratif, namun koordinasi sebagai bentuk kekuasaan fungsional belum menjadi praktik dominan. Ini menunjukkan bahwa dimensi *power* belum dijalankan dalam bentuk orkestrasi kolaboratif antarlembaga, yang seharusnya menjadi tulang punggung dari strategi publik lintas sektor (Mulgan & Geoff, 2009).

Untuk memperjelas bagaimana kelemahan dalam aspek regulasi, koordinasi, dan kepemimpinan tercermin dalam pelaksanaan program di lapangan, berikut ini disajikan tabel analisis yang merangkum strategi penanganan stunting dari sudut pandang dimensi *power* berdasarkan dua program utama yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung:

**Tabel 5.** Analisis Strategi Penanganan Stunting Berdasarkan Dimensi *Power*

| Nama Program                                                | Kewenangan Pemerintah                                                                                                                                                                                                      | Temuan dan Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi strategis oleh Dinkes, BAPPEDA, dan BKKBN</li> <li>Pelaksanaan oleh Dinkes dan TPPS lintas dinas</li> <li>Pembinaan tenaga kesehatan dan kader belum sistematis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legal framework belum cukup kuat untuk implementasi mandatori.</li> <li>Implementasi masih simbolik, tidak berkelanjutan.</li> <li>Kesenjangan antara aturan dan perilaku institusional masih tinggi.</li> <li>Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap implementasi lintas sektor.</li> </ul>                              |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kewenangan DP2KBP3A dalam pemberdayaan keluarga</li> <li>Penyuluhan dan kerjasama dengan ormas/swasta</li> <li>Advokasi teknis berbasis kegiatan kelembagaan</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi kelembagaan belum berjalan fungsional secara sistemik.</li> <li>Struktur formal terbentuk, namun orkestrasi kolaboratif belum optimal.</li> <li>TPPS belum memainkan peran strategis lintas sektor.</li> <li>Strategi lebih fokus ke kegiatan administratif, bukan pada penguatan jejaring lintas aktor.</li> </ul> |

Sumber: Hasil Temuan Penelitian, 2021

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa strategi penanganan stunting dalam dimensi *power* masih menghadapi tantangan dalam mengaktivasi kekuasaan fungsional secara maksimal. Baik dari sisi regulatif, koordinasi, maupun kepemimpinan, program yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan yang tersedia dengan tingkat implementasi yang mampu menciptakan transformasi kelembagaan (Mulgan & Geoff, 2009). Hal ini mempertegas bahwa dominasi pendekatan administratif belum cukup untuk menggerakkan orkestrasi kolaboratif antarpelaku, yang menjadi

syarat utama keberhasilan strategi lintas sektor seperti penanganan stunting (Christensen & Læg Reid, 2013). Dengan kata lain, meskipun desain kelembagaan telah terbentuk secara formal, namun kekuatan eksekusinya belum cukup kuat untuk menyinergikan aktor-aktor yang terlibat secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan (McKay et al., 2015a).

Meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki kerangka regulatif formal yang mendukung strategi penanganan stunting, kekuatan regulatif tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuasaan substantif yang mampu memandu perubahan institusional secara menyeluruh. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti Peraturan Bupati dan pembentukan TPPS lebih bersifat simbolik ketimbang instruksional. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap *rule-based governance* yang terlalu menekankan pada kehadiran norma hukum, namun mengabaikan *enforcement power & compliance capacity* (E.Lindblom, 1968). Dalam konteks ini, strategi publik membutuhkan bukan hanya legitimasi formal, tetapi juga otoritas fungsional yang mengikat praktik organisasi dan perilaku aktor lapangan (Mulgan & Geoff, 2009).

Untuk memperkuat dimensi kekuasaan regulatif, dibutuhkan penguatan *policy instrumentation* berupa mekanisme kontrol dan sanksi administratif yang dapat memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dijalankan oleh semua pihak terkait. Studi Pritchett et al., (2012) tentang *Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA)* menunjukkan bahwa regulasi hanya efektif ketika didesain sebagai alat adaptif dan disertai mekanisme pembelajaran berbasis insentif serta tekanan institusional. Dalam kasus Kabupaten Bandung, pembentukan TPPS perlu didorong menjadi lebih dari sekadar struktur administratif; ia harus dikembangkan sebagai lembaga yang memiliki *mandate, resources, & decision-making authority* untuk mengoordinasikan strategi stunting secara lintas sektor dan berjenjang (Shimaoka & Sato, 2014).

Kelemahan koordinasi lintas sektor dan lemahnya fungsi kelembagaan memperkuat temuan bahwa dimensi *power* belum dijalankan secara kolaboratif. Meski struktur TPPS telah terbentuk dari tingkat kabupaten hingga desa, fungsi koordinatifnya belum menjadi praktik rutin. Koordinasi masih bersifat seremonial dan administratif, bukan sebagai bentuk kekuasaan fungsional yang memungkinkan *collective sense-making & joint decision-making*. Padahal, dalam strategi lintas sektor, kekuasaan seharusnya tidak hanya bersumber dari hierarki, tetapi dari kapasitas untuk membangun arena kolaborasi yang memungkinkan aktor-aktor saling memperkuat. Konsep *collaborative governance* sebagaimana dikembangkan oleh Shimaoka & Sato, (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan strategi kolaboratif tergantung pada kejelasan aturan main, keterlibatan aktor sejak awal, serta keberadaan fasilitator atau orchestrator yang aktif membangun konsensus dan aliansi (Christensen & Læg Reid, 2013).

Temuan ini sejalan dengan kritik Mulgan & Geoff, (2009) bahwa dalam konteks masalah sosial yang kompleks, strategi publik harus mampu menggerakkan *distributed power* yakni kekuasaan yang tersebar namun terorkestrasi. Pemerintah daerah dalam hal ini bukan satu-satunya pelaku, melainkan *policy orchestrator* yang mengatur ritme, peran, dan saling ketergantungan antarlembaga. Di Kabupaten Bandung, belum terbentuk struktur kelembagaan yang memainkan peran sebagai *backbone organization* yang

berfungsi menjaga keselarasan visi, data, dan tindakan antarsektor. Padahal, Bixby, (2014) tentang *collective impact* menunjukkan bahwa strategi sosial seperti penanganan stunting baru efektif ketika ditopang oleh satu entitas yang mengoordinasikan alur data, komunikasi, dan evaluasi secara sistemik dan konsisten.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani stunting dengan menggunakan dua dimensi dari teori strategi publik Geoff Mulgan, yaitu sumber daya dan *power*. Temuan menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional. Pada dimensi sumber daya, strategi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam perencanaan fiskal, kapasitas SDM masih terbatas, sistem data belum terintegrasi lintas sektor, serta dukungan kelembagaan masih bersifat inisiasi tanpa fondasi strategis yang berkelanjutan. Sementara itu, pada dimensi *power*, kekuatan regulatif belum membentuk kewenangan substantif yang mengikat perilaku institusional, koordinasi lintas sektor belum menunjukkan orkestrasi kolaboratif, dan kepemimpinan belum mampu menjadi penggerak utama konsolidasi agenda bersama. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan cenderung bersifat simbolik, belum mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang adaptif dan kolaboratif untuk menurunkan angka stunting secara konsisten dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi arah tindak lanjut strategis. Pertama, perlu dilakukan penguatan struktural terhadap integrasi isu stunting dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan memastikan penganggaran yang berbasis pada prioritas dan hasil (*outcome-based budgeting*). Kedua, peningkatan kapasitas SDM harus mencakup pelatihan teknis, pendistribusian tenaga berbasis kebutuhan lokal, serta insentif yang mendorong kinerja lintas sektor. Ketiga, pengembangan sistem data terpadu dan *real-time* perlu segera diimplementasikan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi regulatif menjadi kekuasaan substantif melalui instrumen pengawasan, insentif, dan mandat kelembagaan yang jelas. Kelima, kepemimpinan strategis perlu dibangun dengan pendekatan kolaboratif antar-OPD dan aktor non-pemerintah agar strategi penanganan stunting dapat berjalan secara sistemik, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lokal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan aktor dan menggunakan pendekatan *multilevel governance* untuk menjangkau kompleksitas implementasi strategi di berbagai *level* pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I., & AR, H. (2024). Strategi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mengatasi Stunting. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(3), 1118–1128. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i3.1507>
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2013). Escaping Capability Traps Through Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA). *World Development*, 51, 234–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.05.011>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2022). *Jumlah Balita Stunting di Kabupaten*

- Bandung (Orang), 2022. <https://bandungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzU2IzI=/jumlah-balita-stunting-di-kabupaten-bandung.html>
- Bappelitbangda Kabupaten Bandung. (2021). *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2021*.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890). [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)60996-4/abstract?cc=y%3D](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60996-4/abstract?cc=y%3D)
- Bixby, K. (2014). Collective Impact: How Backbone Organizations Influence Change Without Formal Authority. *Moving Youth Work Practice Forward: Reflections on Autonomy and Authority*, August.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2013). *Contexts and administrative reforms: a transformative approach*. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781781955130/9781781955130.00019.xml>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- E.Lindblom, C. (1968). Who Needs What Social Research for Policymaking? *Process*, New York.
- Indonesia, K. D. N. R. (2020). *Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)*.
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Buku Saku Nasional PSG 2017*. <https://share.google/wunTaW2g8snJ1XBdj>
- Lemhanas. (2021). *Indonesia Optimis Menjadi Negara Maju*. Lemhanas.Go.Id. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1242-lemhannas-ri-bekerja-sama-dengan-csis-dan-kompas-luncurkan-buku-indonesia-menuju-2045/id>
- McKay, H. A., Macdonald, H. M., Nettlefold, L., Masse, L. C., Day, M., & Naylor, P.-J. (2015a). Action Schools! BC implementation: from efficacy to effectiveness to scale-up. *British Journal of Sports Medicine*, 49(4), 210–218. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-093361>
- McKay, H. A., Macdonald, H. M., Nettlefold, L., Masse, L. C., Day, M., & Naylor, P. J. (2015b). Action Schools! BC implementation: From efficacy to effectiveness to scale-up. *British Journal of Sports Medicine*, 49(4), 210–218. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-093361>
- Mulgan, & Geoff. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Pritchett, L., Andrews, M., & Woolcock, M. (2012). Escaping Capability Traps Through Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA). *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2102794>

- Purwanti, A. R., Widyastuti, T. M., & Suminar, Y. A. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Strategi Penanganan Stunting di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1757–1764.  
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2522>
- Salmon, H. S., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2022). Strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sangihe). *Governance*, 2(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/42186>
- Shimaoka, M., & Sato, M. (2014). *The Role of Intermediary Organizations in Collaborative Governance: The Case of Japan*.
- Srifridayanti, Yunarni, & Dewi, P. I. (2025). Kebijakan Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Kota Palu Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 12(1), 55–68.
- Sulaeman, E., Indra, M. B., Imas, M., & Karmelita. (2022). Analisis Dampak Covid 19 di Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 392–400.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, & Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205–214.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34716/17260>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2020). *Katalog Produk Pengetahuan Sekretariat TNP2K 2019-2020*.  
<https://share.google/sRhNecrpm7MveVDjk>
- Wapresri.go.id. (2022). Vice President Confirms Commitment to 60 Percent Reduction of Toddler Stunting in 12 Priority Provinces. *Wapresri.Go.Id*.  
<https://www.wapresri.go.id/wapres-pastikan-komitmen-penurunan-60-persen-balita-stunting-di-12-provinsi-prioritas/>
- World Health Organization. (2009). *WHO child growth standards: growth velocity based on weight, length and head circumference: methods and development*.  
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241547635>